

Usaha Mikro Dan Menengah Yang Didukung Lembaga Keuangan Dengan Pola Syariah Sebagai Modal Kegiatan Ekonomi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Mohammad Imsin Almustofa¹

¹Fakultas Ilmu Administrasi UNIPDU Jombang

E-mail: humas@unipdu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kelompok UMKM dan lembaga keuangan mikro pola syariah sebagai salah satu model yang bisa dikembangkan untuk melakukan kolaborasi kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa meningkatkan daya saing daerah. Metode deskriptif kualitatif penelitian pengembangan, dengan wawancara, pengamatan dan survei. Hasil penelitian UMKM memiliki jumlah pelaku usaha mencapai 51,3 juta unit berkontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta (97%), menyumbang PDB Rp2.609 triliun (55,6%), sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%) . jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai 600 ribu atau mencapai 69,3% total rekening pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan UMKM perbankan syariah terkonsentrasi di sektor retail (31,1%), jasa usaha (29,3%) dan perdagangan (13,2%). Kegiatan UMKM yang didukung lembaga keuangan syariah adalah layak sebagai alternatif model kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang mampu bertahan dan siap menuju pasar tunggal asean 2015. Karena praktek perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan nature dunia usaha sektor UMKM.

Kata kunci : *umkm, lembaga keuangan syariah, kegiatan ekonomi*

ABSTRACT

This study aims to encourage groups of SMEs and micro-patterns of Islamic financial institutions as one model that can be developed to perform collaborative community economic activities that can enhance regional competitiveness. Qualitative descriptive methods development research, with interviews, observation and research survei. Hasil SMEs have a number of businesses reached 51.3 million units accounting for 99%, employment 90.9 million (97%), accounted for Rp2.609 trillion GDP (55.6%), the contribution of foreign exchange amounting to Rp183, 8 trillion (20%). account the amount of financing for SMEs to reach 600 thousand or 69.3% reaching a total Islamic banking financing account. SME financing Islamic banking sector is concentrated in retail (31.1%), business services (29.3%) and trade (13.2%). MSME activities supported Islamic financial institution is viable as an alternative model of economic activity of small communities that survived and are ready to asean single market by 2015. Because the practice of Islamic banking and its products is in accordance with the nature of the business sector SMEs.

Keywords : *group of small and medium micro enterprises, islamic financial institutions, economic activity*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia begitu penting, karena sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 51,3 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 99%, menyerap tenaga kerja 90,9 juta pekerja (97%) menyumbang PDB sebesar Rp2.609 triliun (55,6%) serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%) (Bank Indonesia, 2010).

Dengan data perkembangan UMKM yang tadi telah diungkapkan dan dengan kenyataan bahwa populasi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor UMKM, sepatutnya sistem perbankan syariah (BMT) bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut. Apalagi, diyakini praktik perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan kondisi dunia usaha sektor UMKM. Jika melihat kinerja pembiayaan perbankan syariah kontribusi itu pada dasarnya sudah jelas terlihat.

Sejauh ini dengan kekuatan 11 bank umum syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 151 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), yang memiliki jaringan kantor mencapai 3.073 unit, perbankan syariah nasional telah menunjukkan perannya. Pembiayaan BUS dan UUS pada sektor UMKM di akhir tahun 2010 telah mencapai Rp52,6 triliun atau persentasenya (share) sebesar 77,1% dari seluruh pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS ke sektor usaha. Pada akhir tahun 2010 itu, pertumbuhan pembiayaan bagi UMKM tersebut mencapai 46,8% atau pertumbuhannya melebihi pertumbuhan total pembiayaan industri perbankan syariah itu sendiri. Sementara jumlah rekening pembiayaan bagi UMKM mencapai lebih dari 600 ribu rekening atau persentasenya mencapai 69,3% dari total rekening pembiayaan perbankan syariah (Islamic Banking (IB), 2011).

Keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM ditunjukkan pula dengan berbagai strategi pembiayaan oleh masing-masing bank syariah secara individu, seperti pembukaan pusat-pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Berdasarkan data pembiayaan sektoralnya, saat ini pembiayaan UMKM perbankan syariah terkonsentrasi pada pembiayaan di sektor retail (31,1%), jasa usaha (29,3%) dan perdagangan (13,2%). Eksposur pembiayaan sektoral UMKM perbankan syariah identik atau sama dengan eksposur total pembiayaan industri.

Kinerja perbankan syariah di atas belum termasuk kontribusi 151 BPRS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. BPRS dengan karakteristik kapasitas yang relatif kecil dan spesifik melayani pelaku usaha di komunitas-komunitas kecil masyarakat, sudah tentu hampir seluruh kemampuan penyediaan pembiayaannya di salurkan pada sektor UMKM. Berdasarkan data pada akhir 2010 fungsi intermediasi BPRS bagi sektor UMKM tampak berjalan cukup optimal, hal ini ditunjukkan dengan angka FDR yang mencapai 128,5%. Meski pembiayaan bermasalah BPRS relatif lebih tinggi di bandingkan kinerja BUS dan UUS yaitu sebesar 6,5%, namun dalam periode 3 tahun terakhir angka pembiayaan bermasalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada skala usaha yang tidak jauh berbeda dan ruang lingkup pelayanan yang juga relatif sama, dalam melayani masyarakat UMKM, BPRS ditemani oleh lembaga keuangan non-bank syariah yang saat ini berkembang tidak kalah tingginya, yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan badan usaha koperasi yang kini dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang jumlahnya kini diperkirakan telah mencapai lebih dari 3000 unit.

Namun meski kontribusi perkembangannya cukup besar, sektor UMKM bukannya tumbuh tanpa memiliki masalah. Masalah di sektor UMKM relatif begitu kompleks, dari masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang bercampur dengan keuangan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini

yang tengah dibenahi oleh pihak-pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal di sektor UMKM, saat ini bank syariah telah melakukan kerjasama dalam penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut. Kerjasama tersebut berupa kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM-nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dilakukan karena memang jangkauan bank syariah besar yang belum menjangkau pelosok-pelosok sentra masyarakat usaha kecil atau lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM.

Skema pembiayaan linkage yang dilakukan bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa channeling, executing atau joint financing. Skema channeling menempatkan BPRS atau BMT sebagai intermedias BUS/UUS dengan pelaku UMKM. Sedangkan skema executing dilakukan ketika badan usaha syariah/ unit usaha syariah (BUS/UUS) menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara itu, skema joint financing adalah skema dimana BUS/UUS dan BPRS/BMT bekerja sama dalam memberikan pembiayaan pada pelaku UMKM. Disamping itu, akhir-akhir ini terbentuk juga kerja sama bank-bank syariah dengan lembaga-lembaga terkait dalam memecahkan masalah lain yang menghantui dunia UMKM, seperti masalah budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Bank syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial dalam upaya meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan penguasaan teknologi. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk program-program pembinaan nasabah. Pembinaan nasabah khususnya bagi nasabah UMKM telah menjadi faktor yang krusial dalam rangka menjaga pembiayaan UMKM yang berkualitas baik.

Dengan ruang-lingkup usaha yang dominan beraktifitas di lingkungan ekonomi domestik, tidak mengherankan sektor UMKM selalu tampil menjadi “pahlawan” bagi perekonomian negeri ini, ketika ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga kerap menghantam ekonomi global. Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Bagaimana dengan kontribusi industri perbankan syariah nasional khususnya baitul maal wattamwil (BMT) terhadap pertumbuhan sektor UMKM?

Pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong peran perbankan syariah di sektor UMKM ini. Pada sisi sektor UMKM, diperlukan upaya perbaikan sarana atau infrastruktur, baik berupa infrastruktur yang bersifat fisik maupun non-fisik, agar sektor tersebut mampu memproduksi dan berkinerja dengan efisien. Perbaikan atau pembenahan sektor UMKM pada gilirannya diharapkan mampu menekan persepsi risiko tinggi yang melekat pada sektor tersebut. Sedangkan pada sisi perbankan syariah diperlukan peningkatan pengetahuan dan keahlian bankir syariah pada dunia UMKM di semua sektornya. Dengan begitu, diharapkan kontribusi perbankan syariah dapat lebih maksimal, misalnya pembiayaan perbankan syariah tidak hanya terkonsentrasi pada sektor retail, jasa usaha dan perdagangan saja dari UMKM tetapi juga sektor potensial lainnya, khususnya sektor produktif seperti sektor pertanian dan manufaktur (Bank Indonesia. 2010).

Dari gambaran langkah dan peran yang telah diambil di jajaran perbankan syariah sebagaimana data tersebut diatas, sudah dibuktikan oleh lembaga keuangan baitul maal wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam mengangkat pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah khususnya di kabupaten Pasuruan bahkan mulai menunjukkan perannya di propinsi Jawa timur melalui jaringan alumni yang tersebar di penjuru propinsi, yang sebagian besar menekuni wirausaha mandiri. Keadaan gambaran peningkatan dan peran lembaga keuangan yang dibawah kendali keluarga besar Pondok pesantren Sidogiri yang terdiri dari Kopontren ,BMT-MMU dan BMT- UGT dalam pemberdayaan UMKM terlihat pada pengkucuran dana ke sektor UMKM dalam kurun waktu lima tahun antara tahun 2005 s/d 2009 yang mencapai kurang lebih RP 150M pada tahun 2009. dan ini pasti berpengaruh juga terhadap peningkatan asset lembaga BMT pondok pesantren Sidogiri.

Berdirinya lembaga keuangan dengan pola syariah (BMT) di pondok pesantren Sidogiri dilatarbelakangi oleh komitmen pendirinya dan para penerusannya untuk peduli dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya, yaitu masyarakat golongan ekonomi rendah atau pengusaha bersekala kecil dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan kredit dari sumber-sumber keuangan informal seperti rentenir dan pengijon, yang dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Karena tingginya bunga lembaga keuangan rentener tersebut, banyak usaha menengah dan kecil di sekitar pondok tidak dapat berkembang atau bahkan menjadi tidak layak karena tingginya beban modal pinjaman. Dari keadaan masyarakat yang agamis, lembaga keuangan mikro yang mampu menyentuh para pelaku usaha kecil serta semangat untuk peduli mengangkat dan mengurangi terhadap kondisi usaha kecil yang terlilit oleh rentener dengan bunga yang mencekik. Penulis berkeyakinan jika UMKM yang didukung oleh lembaga keuangan pola syariah akan layak sebagai model kegiatan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana lembaga keuangan dengan pola syariah seperti BMT, BPRS dan lembaga BUS/UUS mampu mendukung UMKM secara maksimal sehingga layak sebagai model kegiatan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya saing daerah?

METODA

BMT (Baitul maal wattamwil), BPRS dan lembaga BUS/UUS atau padanan balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (menyerupai koperasi). Yang secara konseptual BMT memiliki dua fungsi:

1. Bait maal (Bait = rumah, Maal = harta) Menerima titipan dana zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. Baitul Tamwil (bait = rumah, attamwil = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT, kelompok usaha bersama yang fokus maju dan terus berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

Misi BMT adalah mengembangkan kelompok usaha bersama dan BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian, sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Sedangkan tujuan BMT adalah mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

Pemberdayaan usaha kecil menengah, kata pemberdayaan dan memberdayakan yang merupakan terjemahan dari *empower*. Pemberdayaan adalah upaya membuat suatu kemampuan atau berkekuatan (Depdikbud 1992). Dengan merujuk pada pengertian diatas, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki rakyat.

Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi *pertama*: pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi rakyat dapat berkembang. *Kedua* pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi dan lapangan kerja. *Ketiga* pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju dengan yang belum maju (Beny. R. 1998).

Hasil penelitian sebelumnya peran BMT dalam mengembangkan Usaha kecil menengah (UKM) cukup dirasakan manfaatnya. Studi yang dilakukan Nurul Widyaningrum (2002) terhadap BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor menunjukkan ada empat kelebihan BMT, yakni: adanya kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”. Berbeda dengan perbankan yang lebih mengutamakan nasabah ‘kakap’, prosedur relatif lama, dan keharusan adanya jaminan.

Hasil studi itu cukup menarik untuk disimak, karena ternyata alasan utama UKM menerima kehadiran BMT bukanlah karena sistem syariahnya. Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas mitra ternyata belum terlalu memahami sistem syariah yang digunakan BMT. Sebanyak 61 responden (41 persen) menyatakan hanya tahu sedikit tentang sistem syariah, 71 responden (47 persen) menyatakan tidak tahu, dan hanya 18 (12 persen) yang menyatakan sudah tahu.

PEMBAHASAN

Metode penulisan dari karakteristik masalah yang lebih bersifat kasuistik dan spesifik, metode penulisan yang di gunakan untuk menjawab dari beberapa permasalahan dan tujuan penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mencari informasi faktual yang mendetail dan mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. untuk pembuatan usulan rekomendasi tentang alternatif pengembangan model lembaga keuangan mikro(BMT) sebagai lembaga keuangan yang dapat menyentuh dan peduli dengan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Penggalan datanya melalui observasi wawancara langsung dan dokumentasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis ke sumber data utama yang difokuskan pada pengurus / pengelola Kopontren, BMT MMU dan BMT-UGT pondok pesantren Sidogiri di desa Sidogiri Kraton Kabupaten Pasuruan dan data Bank Indonesia.

BMT-MMU mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, aset maupun omzetnya. Saat ini omzet bisnis syariah mencapai Rp42 miliar per tahun. Adapun jumlah nasabahnya mencapai 12.000 orang lebih. Uni layanannya pun berkembang menjadi 12 unit yang tersebar di berbagai kecamatan di Pasuruan. Hal tersebut tergambar pada tabel jumlah asset tiga lembaga keuangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah asset dalam lima tahun

Tahun	Kopontren	BMT-MMU	BMT-UGT
2006	Rp. 16.374.845.563	Rp.26.783.517.1	Rp.30.314.153.975
2007	Rp.16.581.563.176	Rp.42.333.557.553	Rp.51.3.847.357.776
2008	Rp. 19.675.089.280	Rp.68.104.139.196	Rp.62.828.547.669
2009	Rp.20.636.138.979	Rp.86.263.890.742	Rp. 80.962.748.114

Pengembangan Usaha Bmt Mmu Dan Bmt Ugt Pondok Pesantren Sidogiri

Dengan memanfaatkan jaringan alumni dan guru Ponpes Sidogiri, maka para personil pondok pesantren tersebut lantas membentuk usaha gabungan terpadu (UGT) di Surabaya pada 2002. Menurut manajer BMT-UGT Sidogiri, Abdul Majid Umar, pendirian BMT-UGT dimaksudkan memperluas jaringan BMT Sidogiri ke luar wilayah Pasuruan. Sambutan masyarakat terhadap kehadiran BMT-UGT di Surabaya disebutkan cukup positif, dan kini berhasil menjaring 1.300 orang penabung dengan perputaran dana Rp4 miliar per bulan. Sebagian besar nasabahnya adalah pedagang besi rongsokan. *“Kami menekankan layanan yang adil, mudah dan maslahah atau memberikan manfaat. Semisal*

pada produk pembiayaan jenis mudharabah atau bagi hasil, manajemen menerapkan pola bagi hasil 60% untuk peminjam modal dan sisanya untuk BMT-UGT,” lanjut Abdul Majid.

BMT-UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: mudharabah/bagi hasil, musyarakah/penyertaan modal, murabahah/jual beli, bai'bitsamanil'ajil/jual beli dan qord al hasan/hutang. Produk lainnya adalah tabungan yakni mudharabah umum, pendidikan, Idul Fitri, qurban, walimah, ziarah dan mudharabah berjangka atau deposito. Produk lain yang diandalkan BMT-UGT Sidogiri adalah jasa layanan transfer yakni layanan pengiriman uang bagi masyarakat penabung maupun bukan penabung melalui cabang kantor Koperasi BMT-UGT setempat kepada santri yang tengah menempuh pendidikan. Menurut Abdul Majid, kini Koperasi BMT-UGT telah memiliki 39 unit layanan di seluruh kabupaten/kota di Jatim, dan pada 2010 ditargetkan bertambah menjadi 100 cabang. Omzetnya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada 2005 senilai Rp43 miliar naik menjadi Rp89 miliar pada 2006 dan tahun lalu tercapai Rp180 miliar lebih. Peningkatan omzet diikuti peningkatan aset yang tercatat Rp13 miliar pada 2005 lantas naik menjadi Rp30 miliar pada 2006 dan tahun lalu mencapai Rp51 miliar. Dengan didukung jaringan alumni Ponpes Sidogiri sebanyak 30.000 orang lebih, hingga akhir 2007 koperasi tersebut memiliki anggota 216 orang anggota biasa dan luar biasa ditambah 28.987 orang berstatus calon anggota

Dalam pengelolaan usaha pengasuh pondok pesantren sangat menekankan dengan istilah manajemen rasul, yaitu sebagaimana di sampaikan “*Mahmud mengaku perkembangan BMT-UGT dan BMT-UMM hingga memperoleh kepercayaan masyarakat disebabkan menerapkan manajemen rasul yakni siddiq/jujur, amanah/dapat dipercaya dan fathonah/profesional. Kami percaya, alumni Ponpes Sidogiri masih memegang tiga prinsip itu, sehingga kami berpeluang terus berkembang.*

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Lembaga keuangan dengan pola syariah seperti BMT, BPRS dan lembaga BUS/UUS mampu mendukung dan menumbuh kembangkan UMKM secara maksimal sehingga layak sebagai model kegiatan ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan daya saing daerah .
2. Lembaga keuangan dengan pola syariah seperti peran yang diambil oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah riil terjadi. Peran Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk kegiatan lembaga keuangan ekonomi mikro yang layak untuk di jadikan alternatif model untuk di kembangkan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha kecil menengah di masa yang akan datang. Ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang memanfaatkan lembaga keuangan mikro ini karena lebih sesuai dengan keyakinannya, tranfaran dan menyentuh langsung ke para pelaku di tingkat bawah.

Saran

1. Lembaga keuangan dengan pola syariah seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT) pondok pesantren Sidogiri sepatutnya untuk dijadikan contoh model pengembangan ekonomi kerakyatan yang bisa menumbuh kembangkan sektor UMKM di propinsi Jawa Timur, dan khususnya Kabupaten Jombang yang memiliki corak dan karakteristik masyarakatnya yang santri dan agamis.
2. Hal setrategis yang sangat perlu untuk diperhatikan dan dibenahi secara serius di sektor UMKM yaitu masalah SDM, akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet

- At-Tariqi, Abdullah Abdul Hasan. 2004.*Ekonomi islam, Prinsip dasar dan tujuan* .Yogyakarta: Magistra insania Pres.
- Kasmir. 2004.*Pemasaran Bank*. Jakarta. Prenada Media.
- Boediono. 2008. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*. Cetakan keduapuluh empat. BPFY-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Furqon. 2004. *Statistika Terapan untuk Penelitian*. Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung.
- Muhammad. 2004. *Etika bisnis Islam..* Yogyakarta.(UPP) AMP.YKPN
- Nurgiantoro, N. 2004. *Statistik Terapan*. Cetakan Ketiga. UGM Press. Jogjakarta.
- Prianto, A. 2008. *Ekonomi Mikro*, Cetakan Pertama. Stara Press. Malang
- Priatna, D. dan Rony Setiawan. 2005. *Pengantar Statistik*. Cetakan pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ridwan.Muhammad.2004.*Manajemen Baitul Maalwattanwil(BMT) Yogyakarta UII pres*
- Rangkuti, F. 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sabarguna, B.S. 2005. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. UI Press. Jakarta.
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisa Statistik (Ed.). 2006. *Kabupaten Pasuruan dalam Angka 2005/2006*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. Pasuruan.
- Usman, H. dan P. Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Keenam. Bumi Aksara. Jakarta.